

**GANTI KERUGIAN TERHADAP TANAH MASYARAKAT AKIBAT  
PENGADAAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) OLEH  
PT PLN (PERSERO) KABUPATEN BINTAN**

**Oleh:  
Rio Hermando**

**Abstrak**

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kepentingan sosial dan kepentingan kelangsungan hidup. Tanah memiliki arti penting, bagi masyarakat Indonesia sebagai sumber daya alam yang sangat dekat dengan hak individu, dan setiap individu membutuhkan lahan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Demikian pula bumi dan air serta ruang angkasa di atasnya merupakan bagian dari kekayaan bangsa dan berada pada ranah publik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam milik bangsa dan terjalin dalam hubungan yang diabadikan dengan bangsa Indonesia, inilah inti dari Pasal 1 UUPA yang diuraikan mulai dari ayat (1) sampai dengan ayat (6). Karena tanah memiliki arti penting bagi masyarakat, maka pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum harus selalu memperhatikan masyarakat yang tanahnya terkena proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum akibat pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) oleh PT PLN Persero Bintan dan untuk mengetahui proses ganti rugi tanah masyarakat akibat pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) oleh PT PLN Persero Bintan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder dan data tersier yang kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian, proses pengadaan tanah untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi dilakukan dengan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Bentuk ganti kerugian yang dominan adalah berupa uang, namun terdapat perbedaan penilaian besaran/biaya kerusakan yang dipungut masyarakat atas pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) oleh PT PLN (Persero) Bintan

Kata Kunci: Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, PT PLN Persero

# **COMMUNITY LAND DAMAGES DUE TO PROCUREMENT OF HIGH VOLTAGE AIR LINES (SUTT) BY PT PLN (PERSERO) BINTAN REGENCY**

**By:  
Rio Hermando**

## ***Abstract***

*Human life is inseparable from social interests and the interests of survival. Land has an important meaning, for the people of Indonesia as a natural resource that is very close to individual rights, and every individual needs land to fulfill their basic needs. Likewise, earth and water and space above it are part of the nation's wealth and are in the public domain owned by the Indonesian nation, are natural wealth belonging to the nation and are intertwined in an enduring relationship with the Indonesian nation, this is the essence of Article 1 of the UUPA which is outlined starting from paragraph (1) to paragraph (6). Because land has an important meaning for the community, the government in Land Procurement for Public Interests must always pay attention to the community whose land is affected by the project. The purpose of this research is to find out the procedures for land acquisition for public purposes due to the construction of High Voltage Air Lines (SUTT) by PT PLN Persero Bintan and to find out the compensation process for community land due to the construction of High Voltage Air Lines (SUTT) by PT PLN Persero Bintan . The research conducted is Normative-Empiris legal research with a statutory approach taken from secondary data and tertiary data which is then analyzed. Based on the research results, the land acquisition process for the construction of High Voltage Air Lines is carried out by planning, preparing, implementing, and submitting the results. The dominant form of compensation is in the form of money, but there are differences in the assessment of the amount/cost of damage that is levied by the community for the construction of High Voltage Air Lines (SUTT) by PT PLN Persero Bintan.*

**Keywords:** Compensation, Land Procurement, PT PLN Persero